

Strategi Perkembangan Ekonomi di Era Modern Berbasis Pancasila

Salsalia Ayunda, Tahnia Uswatika Hasanah, Yolanda Anjelli Ariska,
Riska Andi Fitriyono
Universitas Sebelas Maret
riskaandi@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan ekonomi Pancasila sendiri merupakan system perekonomian dengan menjadikan 5 sila Pancasila sebagai dasar strategi perkembangan ekonomi di era modern berbasis Pancasila. Situasi Perkembangan Ekonomi di masa sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat namun ada suatu permasalahan yang dihadapi suatu negara. Strategi perkembangan ekonomi merupakan dasar bagi terwujudnya kemakmuran bangsa. Strategi Perkembangan Ekonomi Di Indonesia, terutama di bidang ekonomi masih banyak permasalahan yang terjadi. Filosofi Pendidikan Ekonomi Pancasila Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa mengimplikasikan bahwa pembangunan nasional merupakan proses perubahan kearah masyarakat Pancasila. Karena hal tersebut, maka gagasan Bung Hatta mengenai Sistem Ekonomi Kerakyatan semakin menguat. Konsep Pendidikan ekonomi Pancasila ialah Ekonomi Pancasila sebagai kebijakan ekonomi yang setelah melalui gerakan seperti jam bandul dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Kebutuhan ekonomi masyarakat merupakan bagian dasar nilai sosial dalam kehidupan negara yang menjadikan konsep Pendidikan ekonomi Pancasila harus dikembangkan dan dipelajari oleh semua warga negara. Idealnya, sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila.

Kata kunci : Pancasila, kewarganegaraan, ekonomi.

ABSTRACT

Pancasila economic education itself is an economic system by making the 5 principles of Pancasila as the basis for a strategy for economic development in the modern era based on Pancasila. The current situation of economic development is experiencing a fairly rapid development, but there is a problem faced by a country. The strategy of economic development is the basis for the realization of the nation's prosperity. Economic Development Strategy In Indonesia, especially in the economic sector, there are still many problems that occur. The philosophy of Pancasila Economic Education Pancasila as the only principle of the nation implies that national development is a process of change towards a Pancasila society. Because of this, Bung Hatta's idea of a People's Economic System was getting stronger. The concept of Pancasila economic education is Pancasila Economy as an economic policy that after going through a pendulum-like movement from left to right, reaches a point of balance. The economic needs of the community are a basic part of social values in the life of the country which makes the concept of Pancasila economic education to be developed and studied by all citizens. Ideally, the Pancasila economic system is an economic system imbued with the Pancasila ideology.

Keywords : Pancasila, education, economy.

PENDAHULUAN

Perekonomian di setiap negara di era modern seperti ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Perkembangan ekonomi sendiri didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan perkapita di suatu negara. Di era modern yang seperti sekarang ini, tentunya perekonomian sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Akan tetapi, di setiap perkembangan pasti ada suatu permasalahan/kesulitan yang dihadapi suatu negara dalam perekonomiannya.

Biasanya permasalahan/kesulitan ekonomi paling banyak terjadi di negara-negara yang berkembang, contohnya di Indonesia. Masalah-masalah yang terjadi di Indonesia cukup banyak. Seperti halnya harga BBM yang naik, kurang memaksimalkan SDA yang dimiliki, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya tenaga kerja yang profesional dan lain sebagainya.

Negara Indonesia merupakan negara yang cukup tertinggal dalam aspek ekonomi di kawasan Asia. Rendahnya perekonomian di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kualitas SDM yang dimiliki. Strategi untuk meningkatkan kualitas SDM agar perekonomian lebih maju yaitu dengan memperluas wawasan global bagi setiap SDM. Untuk mewujudkan wawasan global pada SDM dengan menerapkan Pendidikan dan berkonsep ekonomi Pancasila. Pendidikan ekonomi

Pancasila sendiri merupakan system perekonomian dengan menjadikan 5 sila Pancasila sebagai dasar strategi perkembangan ekonomi di era modern berbasis Pancasila.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah study literatur. Study literatur adalah proses mengkaji dan menganalisis fakta yang lebih dalam. Literatur didukung oleh sumber informasi berupa, e-book, artikel dan jurnal terkait. Penulis mencari sumber teori dan konsep, kemudian menganalisis teori tersebut dan teknik pengumpulan data yang dihasilkan, dengan mencari variabel dari berbagai sumber, yang akhirnya akan ditafsirkan dan dibuat dari berbagai referensi yang telah disebutkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Perkembangan Ekonomi di Masa Sekarang

Strategi perkembangan ekonomi merupakan dasar bagi terwujudnya kemakmuran bangsa. Antara pemerintah dan warga negara harus memiliki hubungan sistematis untuk mencapai sistem ekonomi yang diinginkan, yaitu berdasarkan pada nilai inti Pancasila. Perkembangan ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai suatu perubahan yang dimana suatu negara berkinerja lebih selama periode waktu tertentu, yang dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita. Perkembangan ekonomi adalah sebuah proses,

bukan gambaran ekonomi secara keseluruhan. Di sini kita dapat melihat aspek dinamis ekonomi, yaitu bagaimana ekonomi berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07%. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Konsumsi di Indonesia tidak terkendali karena kondisi dan menyebabkan perekonomian pada konsumsi Rumah Tangga (RT) mengalami penurunan dari 5,04% menjadi -2,63%. Karena adanya kontraksi pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia. Hal ini tentunya tidak dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tetapi didukung oleh pemerintah daerah yang tentunya memiliki peran utama dalam hal tersebut. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang terjadi saat pandemi. Masyarakat dan para pelaku usaha juga tentunya memiliki peran strategis dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan dalam hal fiskal dan moneter.

Adanya peraturan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) menimbulkan *lockdown* yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan perekonomian menurun. Pandemi

menyebabkan Indonesia mengalami *suplly shock* dan *demand shock* pada waktu yang bersamaan. *Suplly shock* terjadi karena adanya pemberlakuan PSBB yang berdampak meningkatkan pengangguran sementara *Demand shock* terjadi karena tidak ada kejelasan akan tindakan pemerintah dalam memberikan kebijakan ekonomi yang dapat meringankan masyarakat sehingga masyarakat yang kena dampaknya mengalami penurunan pendapatan.

Dalam usaha pemulihan perekonomian, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memudahkan dalam bidang fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal mempunyai tiga dorongan sebagai pergerakan perubahan ekonomi, yaitu percepatan belanja pemerintah, relaksasi pajak penghasilan, dan pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui relaksasi APBN. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia agar ikut serta dalam mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk membantu pemulihan perekonomian Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah memiliki tujuan agar perekonomian di Indonesia dapat pulih dan mengalami peningkatan. Berdasarkan fakta, perekonomian di Indonesia saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari pemerintah.

Ekonomi di Era Modern

Di era yang modern seperti sekarang, perkembangan Indonesia di berbagai bidang terutama di sektor ekonomi tentunya berkembang dengan cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan. Dalam melakukan pembangunan tentunya diperlukan modal yang cukup besar, salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana yaitu melalui pasar modal.

Pasar modal adalah sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat berharga. Investasi memiliki peranan penting dalam bidang perekonomian, investasi mampu menciptakan pendapatan, investasi mampu memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan *stock* modal. Pasar modal yang didukung dengan kinerja yang baik tentunya akan menciptakan peluang yang tinggi bagi investor untuk berinvestasi, khususnya dalam bentuk investasi saham. Saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik bagi para investor.

Pasar modal khususnya dalam investasi saham memiliki resiko yang cukup tinggi. Maka dari itu investor yang akan menanamkan dananya perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan informasi yang mempengaruhi harga saham.

Tentunya ekonomi klasik dan ekonomi modern memiliki beberapa perbedaan. Ekonomi klasik menekankan pada kekuatan pasar. Ekonomi klasik juga memiliki tujuan utama yaitu kemakmuran yang artinya semua barang dan jasa

tersedia sesuai dengan kemampuan. Ekonomi klasik menolak adanya ikut campur pemerintah di dalamnya. Sedangkan ekonomi modern ialah aliran pemikiran ekonomi yang tingkatannya lebih kompleks. Tujuan dari ekonomi modern sendiri ialah menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut seperti keterbatasan sumber daya.

Dengan adanya globalisasi, negara yang awalnya tidak sependapat dengan sistem pasar bebas akhirnya secara terus terang telah memberlakukan sistem tersebut. Sistem pasar bebas adalah kondisi jual beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Sistem pasar bebas menerapkan konsepsi derivatif dari sistem liberalisme dan kapitalisme barat. Maksudnya ialah terbukanya perdagangan secara bebas tanpa adanya campur tangan siapapun di dalamnya.

Dalam persaingan sistem pasar, faktor yang dapat mendesak masyarakat adalah sector yang besar, padat modal dan padat teknologi. Seringkali ekonomi berskala kecil menjadi tidak memiliki kekuatan untuk bersaing di dunia pasar bebas. Maka dari itu sebenarnya lebih baik jika sistem pasar tidak diterapkan di Indonesia, tetapi yang perlu diterapkan ialah sistem ekonomi pasar yang terkendali oleh pemerintah sehingga usaha yang dimiliki masyarakat tidak mengalami kerugian.

Filosofi Pendidikan Ekonomi Pancasila

Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa mengimplikasikan bahwa pembangunan nasional merupakan proses perubahan kearah masyarakat Pancasila. Pembangunan nasional merupakan upaya agar nilai kelima sila Pancasila dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa aspek kehidupan ekonomi dan perilaku ekonomi haruslah jelas agar kehidupan ekonomi sesuai dengan yang dicita-citakan pada UUD NKRI 1945.

Perekonomian haruslah disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, dimana kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran individu. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka dampaknya akan terkena kepada masyarakat dimana rakyat akan tertindas sementara yang pusat produksi akan jatuh ke tangan yang berkuasa.

Tata ekonomi Indonesia ditekankan berdasarkan Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, karena ekonomi nasional merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong di bawah pimpinan pemerintah. Sebenarnya sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia kurang menguntungkan secara finansial, tetapi karena mengutamakan kemanusiaan maka sistem tersebut ditetapkan di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Prinsip dasar yang dianut sistem ekonomi Indonesia berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang

diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan.

Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh bapak Drs. Mohammad Hatta. Sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi dimana rakyat sebagai kekuatannya. Pak Hatta juga memiliki gagasan tentang koperasi, dimana badan usaha yang menganut asas kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu ciri sistem ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera. Sistem ekonomi ini bersifat terbuka, berkelanjutan dan mandiri. Bersifat terbuka karena melalui sistem ini masyarakat harus dipastikan dapat menjalankan usaha dan memiliki akses terhadap sumber daya yang ada. Bersifat berkelanjutan yang artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat terus berlangsung tanpa adanya pengorbanan masa depan dari masyarakat itu sendiri. Dan bersifat mandiri karena masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan SDA yang tersedia dan fokusnya untuk memenuhi kebutuhan sesama.

Sistem ekonomi kerakyatan diterapkan sebagai langkah alternatif dari gagalnya Teori Pertumbuhan yang dianut oleh negara berkembang. Tapi pada kenyataannya, beda wilayah beda pula hasilnya. Alih-alih mendapat pertumbuhan ekonomi yang stabil, di beberapa negara berkembang justru sebaliknya. Gagalnya aplikasi dari Teori Pertumbuhan mengakibatkan adanya masalah ekonomi baru, tumbuhnya

budaya hedonis dan konsumtif, perusahaan multinasional mendominasi pasar dan diperparah dengan adanya kesenjangan sosial. Karena hal tersebut, maka gagasan Bung Hatta mengenai Sistem Ekonomi Kerakyatan semakin menguat.

Tentunya sistem ekonomi kerakyatan sendiri memiliki sasaran pokok diantaranya ialah, tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat; jaminan sosial terselenggara bagi anggota masyarakat yang memerlukan, utamanya bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin; kepemilikan modal secara material terdistribusikan merata di seluruh anggota masyarakat; pendidikan nasional dapat terselenggara dengan cuma-cuma bagi semua anak tanpa terkecuali; setiap warga dijamin kebebasannya untuk membuat berbagai serikat ekonomi dan atau menjadi anggotanya.

Ekonomi kerakyatan sejatinya sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan dalam perekonomian nasional negara kita. Kita juga harus berperan aktif dalam menjalankan sistem perekonomian kerakyatan ini. Karena bagaimanapun, sebaik apapun sistem perekonomian yang berlangsung di negara kita, jika warganya acuh dan tidak peduli maka kemakmuran yang ditargetkan tentunya semakin sulit untuk diraih.

Konsep Pendidikan ekonomi Pancasila ialah Ekonomi Pancasila sebagai kebijakan ekonomi yang setelah melalui gerakan seperti jam bandul dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Kanan

diartikan sebagai kebebasan, sedangkan kiri diartikan tumbuh pada intervensi negara dalam struktur yang direncanakan secara terpusat. Singkatnya, Ekonomi Pancasila digambarkan sebagai sistem ekonomi pasar yang dikendalikan pemerintah atau ekonomi pasar yang dikendalikan. Kebutuhan ekonomi dalam membangun masyarakat merupakan bagian mendasar dari nilai-nilai sosial dalam kehidupan negara, sehingga konsep pendidikan ekonomi Pancasila harus dikembangkan dan dipelajari oleh semua warga negara untuk dapat mengelola seluruh sumber daya yang dipunya.

Dalam Proklamasi Kemerdekaan 1945 memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sistem perekonomian di Indonesia selalu berlandaskan Pancasila. Idealnya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berdasar kekeluargaan dan gotong-royong di bawah kepemimpinan pemerintah Indonesia. Pancasila digali dan dibangun berdasar nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia.

Perkembangan Ekonomi melalui Pendidikan Ekonomi Pancasila

Pembangunan ekonomi dalam negara tidak lepas dari peran serta warga negara dalam mengelola sistem perekonomian. Peran warga

negara sangatlah berpengaruh dalam pengelolaan SDA, warga negara memiliki kemampuan untuk menggunakan SDA mereka sendiri dan tidak tergantung pada negara lain. Seperti di era modern seperti sekarang ini banyak negara-negara maju yang menguasai berbagai sektor manufaktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Mereka mempunyai tenaga ahli dan teknologi yang cukup membantu negara-negara maju untuk ke arah yang lebih maju. Kebijakan ekonomi negara harus didasarkan pada prinsip keserasian, keselarasan, dan keseimbangan peran individu, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Selain itu negara juga harus mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperkuat yang lemah dengan menghormati harkat dan martabat manusia. Setiap orang dalam melakukan kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi tidak boleh melakukan kegiatan yang curang, dalam arti tidak boleh mengambil untung dengan menghalalkan segala cara. Selain itu, dalam dunia pendidikan ekonomi mengandung makna bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu berpedoman pada pengakuan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Lalu dalam masyarakat membuka kesempatan ekonomi itu harus secara adil.

Strategi Perkembangan Ekonomi

Di Indonesia, terutama di bidang ekonomi masih banyak permasalahan yang terjadi. Seperti yang sedang booming sekarang ialah harga BBM yang melonjak naik dari

harga biasanya yang menyebabkan harga-harga pada kegiatan ekonomi lainnya yang turut naik. Hal ini membuat keresahan di kalangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya inflasi di Indonesia. Strategi pemerintah yang dapat dilakukan ialah, sebenarnya Indonesia memiliki SDA yang cukup memadai namun negara Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Bisa kita lihat dari masalah BBM yang terjadi, negara Indonesia mengimpor minyak dari Singapura padahal bahan bakar utamanya dari negara kita sendiri, jadi bis akita simpulkan bahwa pemerintah tidak dapat mengelola SDA dengan baik. Lantas yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dapat meningkatkan teknologi yang dipunya serta meningkatkan tenaga ahli yang lebih professional untuk mengelola SDA yang ada.

SIMPULAN

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang terjadi saat pandemi. Suplly shock terjadi karena adanya pemberlakuan PSBB yang berdampak meningkatkan pengangguran sementara Demand shock terjadi karena tidak ada kejelasan akan tindakan pemerintah dalam memberikan kebijakan ekonomi yang dapat meringankan masyarakat sehingga masyarakat yang kena dampaknya mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan

oleh pemerintah yaitu bekerja sama dengan Bank Indonesia agar ikut serta dalam mengoptimalkan berbagai kebijakan moneter yang bertujuan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran Indonesia untuk membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Ekonomi di Era Modern Di era yang modern seperti sekarang, perkembangan Indonesia di berbagai bidang terutama di sektor ekonomi tentunya berkembang dengan cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan. Maka dari itu sebenarnya lebih baik jika sistem pasar tidak diterapkan di Indonesia, tetapi yang perlu diterapkan ialah sistem ekonomi pasar yang terkendali oleh pemerintah sehingga usaha yang dimiliki masyarakat tidak mengalami kerugian. Jiwa aspek kehidupan ekonomi dan perilaku ekonomi haruslah jelas agar kehidupan ekonomi sesuai dengan yang dicita-citakan pada UUD NKRI 1945. Sistem ekonomi Indonesia adalah suatu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, karena ekonomi nasional merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong di bawah pimpinan pemerintah. Sebenarnya sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia kurang menguntungkan secara finansial, tetapi karena mengutamakan kemanusiaan maka sistem tersebut ditetapkan di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Prinsip dasar yang dianut sistem ekonomi Indonesia berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Tentunya

sistem ekonomi kerakyatan sendiri memiliki sasaran pokok diantaranya ialah, tersedianya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat; jaminan sosial terselenggara bagi anggota masyarakat yang memerlukan, utamanya bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin; kepemilikan modal secara material terdistribusikan merata di seluruh anggota masyarakat; pendidikan nasional dapat terselenggara dengan cuma-cuma bagi semua anak tanpa terkecuali; setiap warga dijamin kebebasannya untuk membuat berbagai serikat ekonomi dan atau menjadi anggotanya. Konsep Pendidikan ekonomi Pancasila ialah Ekonomi Pancasila sebagai kebijakan ekonomi yang setelah melalui gerakan seperti jam bandul dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Singkatnya, Ekonomi Pancasila digambarkan sebagai sistem ekonomi pasar yang dikendalikan pemerintah atau ekonomi pasar yang dikendalikan. Kebutuhan ekonomi dalam membangun masyarakat merupakan bagian mendasar dari nilai-nilai sosial dalam kehidupan negara, sehingga konsep pendidikan ekonomi Pancasila harus dikembangkan dan dipelajari oleh semua warga negara untuk dapat mengelola seluruh sumber daya yang dipunya. Idealnya sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, ekonomi nasional yang merupakan usaha bersama berdasar kekeluargaan dan gotong-royong di bawah kepemimpinan pemerintah Indonesia. Perkembangan Ekonomi melalui Pendidikan Ekonomi

Pancasila Pembangunan ekonomi dalam negara tidak lepas dari peran serta warga negara dalam mengelola sistem perekonomian. Seperti yang sedang booming sekarang ialah harga BBM yang melonjak naik dari harga biasanya yang menyebabkan harga-harga pada kegiatan ekonomi lainnya yang turut naik. Lantas yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dapat meningkatkan teknologi yang dipunya serta meningkatkan tenaga ahli yang lebih professional untuk mengelola SDA yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyafiq, S. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. volume 28, nomor 1, juni 2019, 28, 18+29.
- Mahyudi, Z. H. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila. volume 15, nomor.1, juni 2021, 15, 141+159.
- Hasan, Z., & Mahyudi. (2021). Konsep Ekonomi Pancasila. Jurnal Lisan Al-Hal, 15 no. 1, 141+160.
- Hastangka. (2012). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. Pusat Studi Pancasila UGM Yogyakarta, 22, 31+50.
- Kurniawan, D. (2010). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Gema Eksos, 1+15.
- Liska, L. D., & Antari, L. P. (2020). Pendidikan Ekonomi dalam Nilai-Nilai Pancasila. Widyadari Jurnal Pendidikan, 21, 238+248.
- Mubyarto. (2004). Menuju Sistem Ekonomi Pancasila. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 19 no. 1, 16+28.
- Natalia Artha Malau, S. M. (2016). Ekonomi Kerakyatan sebagai Paradigma dan Strategi Baru dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Research Sains, 2 no. 1, 1+8.

Website

- Bappeda, A. (2017, 5 30). Artikel Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi. Retrieved from Bappeda: <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/artikel-pembangunan-pertumbuhan-ekonomi-53>
- Prof. Dr. Hari Wahyono, M.Pd. (2022, 5 11). Pendidikan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Bingkai Ekonomi Pancasila. Retrieved from UM site: <https://um.ac.id/eng/rilis/pendidikan-ekonomi-dan-kesejahteraan-dalam-bingkai-ekonomi-pancasila/>